

**Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup  
Nomor 58 Tahun 1995  
Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit**

**Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup  
No. 58 Tahun 1995**

## **Tentang : Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

1. bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan;
2. bahwa kegiatan rumah sakit mempunyai potensi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair yang dibuang ke lingkungan dengan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;
3. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit.

Mengingat :

1. Undang-undang gangguan (Hinder Ordonnantie) Tahun 1926, Stbl. Nomor 226, setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 56);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

#### KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT

##### Pasal 1

- (1) Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
  1. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian;

2. Limbah cair adalah semua bahan buangan yang berbentuk cair yang kemungkinan mengandung mikroorganisme patogen, bahan kimia beracun dan radioaktivitas;
3. Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit adalah batas maksimal limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari suatu kegiatan rumah sakit;
4. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup;
5. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
6. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa.

#### Pasal 2

- (1) Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 3

- (1) Bagi setiap rumah sakit yang :
  1. Telah beroperasi sebelum dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran A dan wajib memenuhi Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2000;
  2. Tahap perencanaannya dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan ini dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair lampiran A dan wajib memenuhi Baku Mutu Limbah Cair lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2000;
  3. Tahap perencanaannya dilakukan dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan ini berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran B.

#### Pasal 4

(1) Gubernur dapat menetapkan parameter tambahan diluar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini setelah mendapat persetujuan :

1. Menteri dan menteri yang membidangi rumah sakit untuk parameter nonradioaktivitas.
2. Menteri dan Direktur Jenderal Bidang Atom Nasional untuk parameter radioaktivitas.
3. Tanggapan dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak diberikan tanggapan dan/atau persetujuan maka permohonan dianggap telah disetujui.

#### Pasal 5

- (1) Gubernur dapat menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Apabila Gubernur tidak menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini maka berlaku Baku Mutu Limbah Cair dalam lampiran keputusan ini.

#### Pasal 6

Apabila analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan rumah sakit mensyaratkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 5 ayat (1) maka bagi kegiatan rumah sakit tersebut berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan atau pengelola rumah sakit wajib :

1. Melakukan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan;
2. Membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah serta terpisah dengan saluran limpahan air hujan;
3. Memasang alat ukur debit laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut;
4. Memeriksa kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini kepada laboratorium yang berwenang sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
5. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud huruf c dan d sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Gubernur dengan tembusan Menteri, Kepala Bapedal, Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional, instansi teknis yang membidangi rumah sakit serta instansi lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Bagi kegiatan rumah sakit yang menghasilkan limbah cair yang mengandung atau terkena zat radioaktif pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Badan Tenaga Atom Nasional.
- (2) Komponen parameter radioaktivitas yang diberlakukan bagi rumah sakit sesuai dengan bahan radioaktif yang dipergunakan oleh rumah sakit yang bersangkutan.
- (3) Bagi rumah sakit yang tidak menggunakan bahan radioaktif dalam kegiatannya, tidak diberlakukan kelompok parameter radioaktivitas dalam pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 atau pasal 6 keputusan ini dan persyaratan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air wajib dicantumkan dalam izin Undang-undang gangguan (Hinder Ordiinantie).

#### Pasal 10

(1) Apabila Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan sebelum keputusan ini :

1. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;
2. Baku Mutu Limbah Cair lebih longgar daripada Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini wajib disesuaikan dengan Baku Mutu Limbah Cair dalam keputusan ini selambat-lambatnya satu tahun setelah ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 1995

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Sarwono Kusumaatmadja

**LAMPIRAN A**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**

**NO. 58 TAHUN 1995 TANGGAL 21 DESEMBER 1995**

**BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
BOD <sub>5</sub>	75
COD	100
TSS	100
pH	6,0 – 9,0

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai aslinya

Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup

Bidang Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian

Hambar Martono

**LAMPIRAN B****KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP****NO. 58 TAHUN 1995 TANGGAL 21 DESEMBER 1995****BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM
<b>FISIKA</b>	
Suhu	30°C
<b>KIMIA</b>	
pH	6 – 9
BOD <sub>5</sub>	30 mg/L
COD	80 mg/L
TSS	30 mg/L
NH <sub>3</sub> Bebas	0,1 mg/L
PO <sub>4</sub>	2 mg/L
<b>MIKROBIOLOGIK</b>	
MPN – Kuman Golongan Koli/100mL	10.000
<b>RADIOAKTIVITAS</b>	
<sup>32</sup> P	7 X 10 <sup>2</sup> Bq/L
<sup>35</sup> S	2 X 10 <sup>3</sup> Bq/L
<sup>45</sup> Ca	3 X 10 <sup>2</sup> Bq/L
<sup>51</sup> Cr	7 X 10 <sup>4</sup> Bq/L
<sup>67</sup> Ga	1 X 10 <sup>3</sup> Bq/L
<sup>85</sup> Sr	4 X 10 <sup>3</sup> Bq/L
<sup>99</sup> Mo	7 X 10 <sup>3</sup> Bq/L
<sup>113</sup> Sn	3 X 10 <sup>3</sup> Bq/L

$^{125}\text{I}$	$1 \times 10^4 \text{ Bq/L}$
$^{131}\text{I}$	$7 \times 10^4 \text{ Bq/L}$
$^{192}\text{Ir}$	$1 \times 10^4 \text{ Bq/L}$
$^{201}\text{Tl}$	$1 \times 10^5 \text{ Bq/L}$

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai aslinya

Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup

Bidang Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian

Hambar Martono